

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
MENURUT PENGELUARAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2013-2014
*GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT
BY EXPENDITURE
KOLAKA TIMUR REGENCY 2013-2014***

<https://koltimkab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu : pendekatan produksi/penyediaan (PDB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDB menurut Pengeluaran/*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor, dan Impor. Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

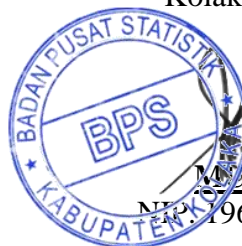
Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Kolaka, September 2015

Kepala,



[Handwritten Signature]
M. H. H. HLIS, SE, M.Si

NIP. 19661231 198903 1 013

<https://koltimkab.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	viii
Daftar Lampiran	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Pendapatan Regional	2
1.2. Kegunaan Statistik Pendapatan Regional	4
BAB II METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA	
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	7
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	10
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	13
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	17
2.5 Perubahan Inventori	23
2.6 Ekspor dan Impor Barang serta Jasa	28
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN JAWA BARAT BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2013-2014	
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Kabupaten Kolaka Timur Menurut Pengeluaran	32 38
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	44
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	45
3.4 Konsumsi Akhir Pemerintah	47
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	49
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	50

3.7 Perkembangan Ekspor	52
3.8 Perkembangan Impor	53

BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB MENURUT PENGELUARAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2013-2014

4.1 PDRB (Nominal)	55
4.2 Perbandingan Penggunaan PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor.....	57
4.3 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	59
4.4 Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	60
4.5 Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	61
4.6 Perbandingan PDRB terhadap Impor	62
PENUTUP	63
LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL DALAM URAIAN

Nomor		Halaman
1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2013-2014	33
2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2013 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2013- 2014.....	34
3.	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2013 – 2014.....	36
4	Pertumbuhan PDRB ADHK 2013 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2013 – 2014.....	37
5.	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kolaka Timur, Tahun 2013 - 2014.....	38
6.	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kolaka Timur, Tahun 2013 – 2014.....	39
7.	Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kolaka Timur, Tahun 2013 – 2014.....	41
8.	Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kolaka Timur, Tahun 2013 – 2014	42
9.	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kolaka Timur, Tahun 2013 – 2014.....	43
10.	Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRRT Kabupaten Kolaka Timur, Tahun 2013 – 2014.....	44
11.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, Tahun 2013 – 2014.....	45

12.	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Kolaka Timur, Tahun 2013 – 2014.....	47
13.	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Kolaka Timur, Tahun 2013 – 2014	49
14.	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2013 – 2014	51
15.	Perkembangan Impor Barang dan Jasa Kabupaten Kolaka Timur, Tahun 2013 – 2014.....	53
16.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Kolaka Timur, Tahun 2013 – 2014	56
17	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2013 – 2014.....	57
18	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2013 – 2014.....	59
19	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Kolaka Timur, Tahun 2013 – 2014.....	60
20	Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2013 – 2014.....	61
21	Rasio PDRB terhadap Impor Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2013 – 2014.....	62

DAFTAR GRAFIK

Nomor	Halaman
1. Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kolaka Timur, Tahun 2013 - 2014.....	32

<https://koltimkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL DALAM LAMPIRAN

Nomor		Halaman
1.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran , Kabupaten Kolaka Timur	68
2.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran , kabupaten Kolaka Timur.....	69
3.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran , Kabupaten Kolaka Timur.....	70
4.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kolaka Timur.....	71
5.	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran , Kabupaten Kolaka Timur.....	72
6.	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran , Kabupaten Kolaka Timur.....	73

<https://koltimkab.bps.go.id>

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN PENDAPATAN REGIONAL

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi,

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2.

Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga (2) lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan

jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

<https://koltimkab.bps.go.id>

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PENDAPATAN REGIONAL

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan komunikasi, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri.

7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

<https://koltimkab.bps.go.id>

***BAB II
METODE ESTIMASI DAN SUMBER
DATA***

<https://koltimkab.go.id>

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi, adalah:

- makanan dan minuman baik bahan maupun makanan jadi, termasuk minuman beralkohol, rokok, dan tembakau;
- perumahan dan fasilitasnya, seperti biaya sewa/kontrak rumah, bahan bakar, rekening telepon, listrik, air, biaya pemeliharaan dan perbaikan rumah, termasuk imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);

- bahan pakaian, pakaian jadi, alas kaki, dan penutup kepala;
- barang tahan lama seperti mobil, meubeler, perabot dapur, TV, perhiasan, alat olah raga, binatang peliharaan, dan tanaman hias;
- barang lain, seperti bahan kebersihan (sabun mandi, sampo, dsj.), bahan kecantikan (kosmetik, bedak, lipstik, dsj.), obat-obatan, vitamin, buku, alat tulis, surat kabar;
- jasa-jasa, seperti kesehatan (biaya rumah sakit, dokter, imunisasi, dsj.), pendidikan (biaya sekolah, kursus, dsj.), ongkos transportasi, perbaikan kendaraan, biaya hotel, dan ongkos pembantu rumah tangga;
- barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen luar wilayah atau luar negeri termasuk dalam konsumsi rumah tangga dan diperlakukan sebagai impor. Sedangkan pembelian langsung oleh non-residen diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut (UN, 1993).

Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.

Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk

dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah. Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Selama ini, penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator *suplay* dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis

pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;

- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.

- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sbb :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok

atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lain-nya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sbb:

1. memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal

ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

iv. Penghitungan PDRB Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Provinsi adh Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut :

$$\text{PK-P adh Berlaku} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yg dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi adh Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/ Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada zzdiwilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

b. PK-P Provinsi adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan.

Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii Cakupan

PMTB terdiri dari :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagai-nya;
2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data
 - a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota.
 - b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
 - c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
 - d. Laporan keuangan perusahaan.

- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

3. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “*arus komoditas*”. Dalam hal ini penyediaan atau “*supply*” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya

transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai *adh berlaku* atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB *adh Konstan*, maka PMTB *adh Berlaku* tersebut di "*deflate*" (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik *adh Berlaku* maupun *adh Konstan*.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB *adh Berlaku*. Untuk memperoleh nilai *adh Konstan* adalah dengan *men-deflate* PMTB (*adh Berlaku*) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di “reflate” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Ke dua*, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men“deflate” PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

i Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;

- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv **Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan**

1. **Sumber data**

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sbb :

- menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara mendeflate stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan menginflate perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan

stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. mendeflate nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

2.6. EKSPOR IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut

- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

iv Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga free on board (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia

(NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented trasnsaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

<https://koltimkab.bps.go.id>

BAB III
TINJAUAN PEREKONOMIAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN
2013 - 2014

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Kolaka Timur akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2010 s.d 2014, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kolaka digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

3.1 TINJAUAN AGEGAT PDRB KOLAKA MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Kolaka menunjukkan tanda pemulihan, setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB.

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2013-2014

Komponen Pengeluaran	(Juta Rp)	
	2013	2014
(1)	(2)	(3)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1.647.321,1	1.831.176,5
2. Konsumsi LNPRT	36.537,8	40.670,8
3. Konsumsi Pemerintah	258.993,0	279.766,6
4. PMTB	903.918,5	1.020.406,7
5. Perubahan Inventori	102.032,4	174.531,8
6. Ekspor	363.768,2	633.796,9
7. Impor	800.814,7	1.131.837,5
Total PDRB	2.511.756	2.848.512

Nilai PDRB Kabupaten Kolaka Timur (adh Berlaku) selama periode tahun 2013 s.d 2014 menunjukkan peningkatan dari tahun 2013 ke tahun 2014. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

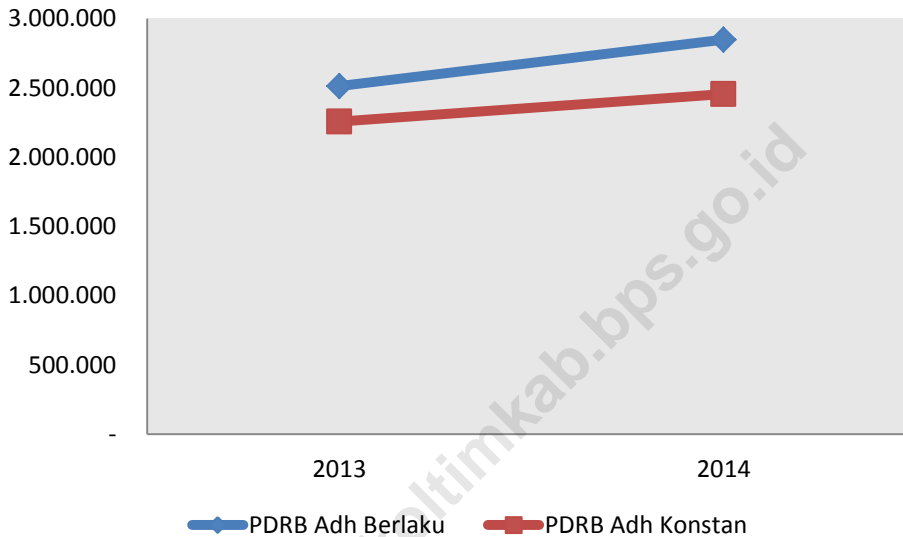
**Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kolaka Timur
Tahun 2013-2014**

(Juta Rp)

Komponen Pengeluaran	2013	2014
(1)	(2)	(3)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1.459.379,0	1.551.784,3
2. Konsumsi LNPRT	19.662,2	20.635,9
3. Konsumsi Pemerintah	231.007,9	238.680,7
4. PMTB	920.745,7	982.745,2
5. Perubahan Inventori	70.164,0	110.017,6
6. Ekspor	182.030,3	310.446,4
7. Impor	617.826,0	758.574,7
Total PDRB	2.256.163	2.455.735

Selain dinilai atas dasar harga (adh) Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai adh Konstan 2010 atau adh berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2013-2014, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kolaka berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada tabel 2 diatas.

Grafik 1. Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kolaka Timur, Tahun 2013 - 2014



Dari grafik di atas, nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB adh Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku. Dalam PDRB adh Konstan pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

**Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kolaka Timur
Tahun 2013 – 2014**

Komponen Pengeluaran	2013	2014
(1)	(2)	(3)
1. Konsumsi Rumah Tangga	65,58	64,29
1. Konsumsi LNPRT	1,45	1,43
2. Konsumsi Pemerintah	10,31	9,82
3. PMTB	35,99	35,82
4. Perubahan Inventori	4,06	6,13
5. Ekspor	14,48	22,25
6. Impor	31,88	39,73
Total PDRB	100,00	100,00

(Persen)

Berdasarkan tabel 3 diatas terlihat bahwa selama periode 2013 - 2014, produk yang dikonsumsi di wilayah Kabupaten Kolaka Timur sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 50 persen). Di sisi lain, pengeluaran untuk capital (PMTB) juga mempunyai peran relative besar dengan kontribusi di atas 35 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 8,82 - 10,31 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Di sisi lain, pada tahun 2013-2014 perdagangan antar daerah yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai impor cenderung lebih tinggi dari nilai ekspor. Kecenderungan perdagangan antar daerah dalam periode tersebut yang menunjukkan dalam kondisi “defisit”.

**Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kolaka Timur
Tahun 2013 – 2014**

Komponen Pengeluaran	(Persen)	
	2013	2014
(1)	(2)	(3)
1. Konsumsi Rumah Tangga	N/A	6,99
2. Konsumsi LNPRT	N/A	4,95
3. Konsumsi Pemerintah	N/A	3,32
4. PMTB	N/A	6,73
5. Perubahan Inventori	N/A	56,80
6. Ekspor	N/A	70,55
7. Impor	N/A	22,78
Total PDRB	N/A	8,85

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kolaka dari tahun 2013 s.d 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 8,85 persen.

**Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran
Kabupaten Kolaka Timur, Tahun 2013 - 2014**

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2013	2014
(1)	(2)	(3)
1. Konsumsi Rumah Tangga	114	118
2. Konsumsi LNPRT	186	197
3. Konsumsi Pemerintah	112	117
4. PMTB	98	104
5. Perubahan Inventori	145	159
6. Ekspor	200	204
7. Impor	130	149
Total PDRB	111	116

Sementara itu, indeks implisit¹ PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan) juga menunjukkan peningkatan.

3.1 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

¹ Indeks perkembangan

Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kolaka Timur, Tahun 2013 – 2014

Uraian	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Total Konsumsi Rumah Tangga		
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	1.647.321,1	1.831.176,5
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	1.450.379,0	1.551.784,3
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	65,58	64,29
konsumsi per- kapita/tahun (<i>Rp</i>)		
a. ADHB	14.528.690,6	16.150.220,0
b. ADHK 2010	6.492.848,6	6.946.805,3
Pertumbuhan ²		
a. Total konsumsi RT		6,99
b. Perkapita		7,0

Data berikut, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2013 - 2014 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan baik dalam nominal (adh Berlaku) maupun riil (adh Konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2013 s.d 2014 mengalami sedikit penurunan kontribusi. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu 65,58 persen turun menjadi 64,29 persen pada tahun 2014.

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran

² Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut *adh Berlaku* maupun *adh Konstan 2010*. Pengeluaran ini meningkat dari 14.528 ribu rupiah di tahun 2013 meningkat menjadi 16.150 ribu rupiah di tahun 2014.

Sementara itu, pada perkiraan *adh Konstan 2010*, rata-rata konsumsi rumah tangga per rumah tangga tumbuh pada kisaran 7 persen. Di sisi lain, rata-rata konsumsi per-kapita juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik *adh Berlaku* maupun *adh Konstan 2010*. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Kolaka Timur meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas).

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga *adh Konstan* mampu tumbuh 6,99 persen di tahun 2014. Nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Tabel 7. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kolaka Timur, Tahun 2013 – 2014³

Kelompok Konsumsi	(Persen)	
	2011	2013
(1)	(2)	(3)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	43,04	43,20
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,18	4,03
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	10,67	10,51
d. Kesehatan & Pendidikan	8,90	8,71
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	19,93	20,79
f. Hotel & Restoran	3,11	3,01
g. Lainnya	10,18	9,75
Total Konsumsi	100,00	100,00

Secara rata-rata dari tahun 2013 s.d 2014, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Kabupaten Kolaka Timur, bahwa konsumsi rumah tangga untuk makanan, minuman, dan rokok lebih tinggi dibandingkan konsumsi lainnya. Proporsi untuk makanan, minuman dan rokok pada masing-masing tahun mencapai 43,04 persen (2010) dan 43,20 persen (2014).

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan,

³ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

Tabel 8. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kolaka Timur, Tahun 2013 – 2014

Kelompok Konsumsi	(Persen)	
	2013	2014
(1)	(2)	(3)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	N/A	6,42
b. Pakaian dan Alas Kaki	N/A	6,86
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	N/A	3,74
d. Kesehatan & Pendidikan	N/A	8,43
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	N/A	10,63
f. Hotel & Restoran	N/A	5,13
g. Lainnya	N/A	4,39

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mampu tumbuh sebesar sebesar 6,99 pada tahun 2014. Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kolaka Timur, Tahun 2013 – 2014⁴

Kelompok Konsumsi	(Persen)	
	2013	2014
(1)	(2)	(3)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	N/A	4,86
b. Pakaian dan Alas Kaki	N/A	0,47
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	N/A	5,46
d. Kesehatan & Pendidikan	N/A	0,30
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	N/A	4,81
f. Hotel & Restoran	N/A	2,46
g. Lainnya	N/A	2,06

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam tabel 9, menunjukkan peningkatan untuk setiap kelompok konsumsi rumah tangga.

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana hal tersebut dapat dilihat dari proporsinya terhadap PDRB yang minor.

⁴ Tingkat perubahan harga produk konsumsi

Proporsi pengeluaran konsumsi LNPRT cenderung mengalami penurunan yang relative kecil dari tahun 2013 ke tahun 2014. Pertumbuhan untuk konsumsi LNPRT sebesar 4,95 di tahun 2014.

**Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT
Kabupaten Kolaka Timur, Tahun 2013 – 2014**

Uraian	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Total Konsumsi LNPRT		
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	36.537,8	40.670,8
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	19.662,2	20.635,9
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,45	1,43

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Kolaka Timur serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian dibawah ini

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, Tahun 2010 - 2014

U r a i a n	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Total Konsumsi Pemerintah		
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	258.993,0	279.766,6
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	231.007,9	238.680,7
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	10,31	9,82
Laju Pertumbuhan		3,32

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan pertumbuhan 3,32 persen di tahun 2014. Pada tahun 2013 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adh Berlaku sebesar 258.993,0 Juta rupiah, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2014 nilainya mencapai 279.766,6 Juta rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah adh Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 231.007,9 Juta rupiah menjadi 238.680,7 Juta rupiah di tahun 2014. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Sebaliknya proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB mengalami penurunan, dari hanya 10,31 persen ditahun 2013 turun menjadi 9,82 persen pada tahun 2014.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung.

Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2013 konsumsi pemerintah per-kapita adh Berlaku sebesar 2.284 ribu rupiah, dan terus meningkat pada tahun 2014 sebesar 2.467 ribu rupiah.

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita adh Konstan (2010) juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas.

<https://koltimkab.bps.go.id>

3.4 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁵. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Kolaka Timur, Tahun 2013 – 2014

Uraian	2011	2013
(1)	(2)	(3)
Total PMTB		
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	903.918,5	1.020.406,7
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	920.745,7	982.745,2
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	35,99	35,82
Struktur PMTB ⁶	44,41	45,39
a. Bangunan (<i>Juta Rp</i>) (%)	55,59	54,61
b. Non Bangunan (<i>Mil Rp</i>)		
Total PMTB (<i>Juta Rp</i>) (%)	(100,00)	(100,00)
Pertumbuhan ⁷ (%)		
a. Bangunan		8,96
b. Non Bangunan		5,35
Total PMTB		6,73

⁵ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

⁶ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Data di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2013 - 2014 mempunyai pertumbuhan yang positif. Sub komponen bangunan dan non bangunan merupakan komponen dengan proporsi hampir seimbang dalam pembentukan modal tetap. Pertumbuhan di sektor bangunan dan non bangunan juga memiliki pertumbuhan yang positif.

Proporsi non bangunan terhadap total PMTB relatif meningkat selama periode 2013 - 2014 (tabel 12). Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB tersebut. Pertumbuhan "riil" sub komponen bangunan pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan positif sebesar 8,96 persen dari tahun sebelumnya. Sementara Non Bangunan mengalami sebesar 5,35 persen tahun 2014. Secara umum, selama kurun waktu tahun 2013-2014 pertumbuhan PMTB mengalami pertumbuhan positif yang mencapai besaran angka 6,73 persen.

3.5 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk "**persediaan**" berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan.

Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kabupaten Kolaka Timur, Tahun 2013 – 2014**

U r a i a n	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Total Nilai Inventori		
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	102.032,4	174.531,8
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	70.164,0	110.017,6
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	4,06	6,13

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya

mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Pada Tahun 2013 perubahan inventori sebesar 102.032,4 Juta rupiah. Sedangkan tahun 2014 perubahan inventori mengalami peningkatan sebesar 174.531,8 Juta rupiah.

3.6 PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Kolaka Timur saja, tetapi dikonsumsi oleh daerah lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tabel 14. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2013 - 2014

Uraian	2013	2014
(1)	(3)	(5)
Total Nilai Ekspor		
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	363.768,2	633.796,9
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	182.030,3	310.446,4
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	14,48	22,25
Pertumbuhan ⁸		70,55

⁸ Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2010)

Secara total, nilai ekspor tahun dari tahun 2013 hingga tahun 2014 menunjukkan peningkatan, masing-masing tahun sebesar 363.768,2 Juta rupiah di tahun 2013 dan 633.796,9 Juta rupiah pada tahun 2014. Sejalan dengan nilai ekspor adh Berlaku, nilai ekspor adh Konstan 2013 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung meningkat dengan nilai “riil” masing-masing tahun sebesar 182.030,3 Juta rupiah (2013); dan 7310.446,4 Juta rupiah (2014). Selama kurun waktu 2013 - 2014, secara nominal nilai ekspor mengalami peningkatan, begitu juga proporsinya terhadap PDRB cenderung meningkat, yaitu dari 14,48 persen pada tahun 2013 menjadi 22,25 persen di tahun 2014.

3.7 PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Indonesia. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor.

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Kabupaten Kolaka Timur terhadap ekonomi atau produk daerah lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kolaa di luar daerah, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

**Tabel 15. Perkembangan Impor Barang dan Jasa
Kabupaten Kolaka Timur, Tahun 2013 - 2014**

Uraian	2011	2013
(1)	(3)	(5)
Total Nilai Impor		
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	800.814,7	1.131.837,5
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	617.826,0	758.574,7
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	31,88	39,73

Tabel 15 di atas menunjukkan bahwa pola perkembangan impor Kabupaten Kolaka Timur pada periode tahun 2013 s.d 2014 cenderung meningkat (baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010).

Proporsi impor pada tahun 2013 dan 2014 mengalami peningkatan yaitu sebesar 31,88 persen dan 39,73 persen. Di sisi lain, secara riil nilai impor mengalami pertumbuhan positif sebesar 22,78 persen.

<https://koltimkab.bps.go.id>

BAB IV
PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB
MENURUT PENGELUARAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN
2013 - 2014

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita

**Tabel 16. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kabupaten Kolaka Timur, Tahun 2013 – 2014**

U r a i a n	2011	2013
(1)	(2)	(3)
Nilai PDRB (<i>Juta Rp</i>)		
- ADHB	2.511.756	2.848.512
- ADHK 2010	2.256.163	2.455.735
PDRB perkapita (<i>Rp</i>)		
- ADHB	22.152.651,9	25.122.697,2
- ADHK 2010	10.100.067,2	10.993.483,3
Pertumbuhan		
PDRB perkapita ADHK 2010		8,8

PDRB per-kapita Kabupaten Kolaka Timur menunjukkan pertumbuhan yang positif (tabel 16), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Kolaka Timur rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi RT di wilayah Kabupaten Kolaka Timur dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB (sekitar 50 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Kolaka Timur sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Tabel 17. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2013 – 2014

U r a i a n	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Juta Rp)	1.647.321,1	1.831.176,5
Total Ekspor (ADHB) (Juta Rp)	363.768,2	633.796,9
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	4,53	2,89

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2014, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga lebih dari 2,89 kali dari yang dieskpor. Hal ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Peningkatan rasio yang relatif tajam pada tahun 2013 (4,53) lebih disebabkan karena penurunan nilai ekspor, sementara sebaliknya konsumsi rumah tangga justru meningkat. Secara implisit data tersebut menjelaskan, bahwa nilai konsumsi akhir rumah tangga semakin meningkat dan atau sebaliknya nilai ekspor semakin menurun. Peningkatan dan penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan volume maupun harga. Selain itu, peningkatan yang relatif tajam juga disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah Kabupaten Kolaka Timur digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 18. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB
Tahun 2013 – 2014**

Uraian	2013	2014
(1)	(3)	(5)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Juta Rp)	1.647.321,1	1.831.176,5
Total PMTB (ADHB) (Juta Rp)	903.918,5	1.020.406,7
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	1,82	1,79

Seperti halnya terhadap ekspor, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung menurun, dari sebesar 1,82 pada tahun 2013 menjadi 1,79 pada tahun 2014.

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi

rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 19. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Kolaka Timur, Tahun 2013 – 2014

Uraian	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Konsumsi Akhir (ADHB)		
<i>(Juta Rp)</i>		
a. Rumah tangga	1.647.321,1	1.831.176,5
b. LNPRT	36.537,8	40.670,8
c. Pemerintah	258.993,0	279.766,6
Jumlah	1.942.851,90	2.151.613,90
PDRB (ADHB)		
<i>(Juta Rp)</i>	2.511.756	2.848.512
Proporsi	77,35	75,53

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 75 persen). Meskipun konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, namun proporsinya terhadap PDRB justru semakin mengalami penurunan. Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) memiliki peran yang relatif kecil.

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar negeri. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 21. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2013 – 2014

Uraian	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Ekspor (ADHB) (Juta Rp)	363.768,2	633.796,9
Total PMTB (ADHB) (Juta Rp)	903.918,5	1.020.406,7
Rasio Ekspor terhadap PMTB	0,40	0,62

Pada tabel 21 terlihat bahwa nilai PMTB cenderung memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan nilai ekspor. Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Peningkatan rasio tersebut di antaranya disebabkan oleh kenaikan ekspor yang relatif meningkat bersamaan dengan kenaikan PMTB.

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang

berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh negara lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

**Tabel 22. Rasio PDRB terhadap Impor
Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2013 – 2014**

U r a i a n	2013	2014
(1)	(2)	(3)
PDRB (ADHB) (Juta Rp)	2.511.756	2.848.512
Total Impor (ADHB) (Juta Rp)	800.814,7	1.131.837,5
Rasio PDRB terhadap Impor	3,14	2,52

Rasio PDRB terhadap impor tahun 2013 - 2014 menunjukkan penurunan dari 3,14 (2013) turun menjadi 2,52 (2014). Penurunan rasio menunjukkan bertambahnya ketergantungan PDRB terhadap produk impor.

<https://koltimkab.bps.go.id>

BAB V

PENUTUP

1. PDRB menurut penggunaan tahun 2013 s.d 2014 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Kolaka Timur pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2010 s.d 2014, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.

4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, dan transfer berjalan (*current transfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Kolaka Timur terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*).

<https://koltimkab.bps.go.id>

LAMPIRAN

<https://koltimkab.bps.go.id>

**Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran , Kabupaten Kolaka Timur**

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2013*	2014**
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	1.647.321,1	1.831.176,5
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	708.951,2	791.122,5
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	68.817,6	73.881,4
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	175.847,3	192.387,0
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	146.589,5	159.416,0
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	328.329,6	380.681,3
1.f. Hotel dan Restoran	51.169,0	55.118,1
1.g. Lainnya	167.616,9	178.570,3
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	36.537,8	40.670,8
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	258.993,0	279.766,6
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	903.918,5	1.020.406,7
4.a. Bangunan	401.429,4	463.171,1
4.b. Non-Bangunan	502.489,1	557.235,6
5. Perubahan Inventori	102.032,4	174.531,8
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	363.768,2	633.796,9
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	800.814,7	1.131.837,5
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7)	2.511.756	2.848.512

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

<https://koltimkab.bps.go.id>

**Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran , Kabupaten Kolaka Timur**

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2013*	2014**
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	1.450.379,0	1.551.784,3
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	600.814,1	639.361,5
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	62.376,8	66.656,1
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	158.455,3	164.379,9
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	129.573,5	140.495,4
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	312.472,4	345.677,5
1.f. Hotel dan Restoran	44.935,5	47.241,3
1.g. Lainnya	141.751,4	147.972,7
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	19.662,2	20.635,9
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	231.007,9	238.680,7
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	920.745,7	982.745,2
4.a. Bangunan	353.546,6	385.224,1
4.b. Non-Bangunan	567.199,1	597.521,1
5. Perubahan Inventori	70.164,0	110.017,6
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	182.030,3	310.446,4
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	617.826,0	758.574,7
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7)	2.256.163	2.455.735

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

<https://koltimkab.bps.go.id>

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran , Kabupaten Kolaka Timur

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2013*	2014**
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	65,58	64,29
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	28,23	27,77
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,74	2,59
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,00	6,75
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	5,84	5,60
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	13,07	13,36
1.f. Hotel dan Restoran	2,04	1,93
1.g. Lainnya	6,67	6,27
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,45	1,43
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	10,31	9,82
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	35,99	35,82
4.a. Bangunan	15,98	16,26
4.b. Non-Bangunan	20,01	19,56
5. Perubahan Inventori	4,06	6,13
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	14,48	22,25
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	31,88	39,73
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7)	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran , Kabupaten Kolaka Timur

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran <i>(1)</i>	2013*	2014**
	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)		6,99
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok		6,42
1.b. Pakaian dan Alas Kaki		6,86
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga		3,74
1.d. Kesehatan dan Pendidikan		8,43
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya		10,63
1.f. Hotel dan Restoran		5,13
1.g. Lainnya		4,39
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT		4,95
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)		3,32
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)		6,73
4.a. Bangunan		8,96
4.b. Non-Bangunan		5,35
5. Perubahan Inventori		56,80
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)		70,55
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)		22,78
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7)		8,85

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100)
Menurut Pengeluaran , Kabupaten Kolaka Timur**

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2013*	2014**
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	114	118
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	118	124
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	110	111
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	111	117
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	113	113
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	105	110
1.f. Hotel dan Restoran	114	117
1.g. Lainnya	118	121
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	186	197
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	112	117
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	98	104
4.a. Bangunan	114	120
4.b. Non-Bangunan	89	93
5. Perubahan Inventori	145	159
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	200	204
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	130	149
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7)	111	116

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

<https://kolimkab.bps.go.id>

**Tabel 6. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100)
Menurut Pengeluaran , Kabupaten Kolaka Timur**

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2013*	2014**
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)		3,90
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok		4,86
1.b. Pakaian dan Alas Kaki		0,47
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga		5,46
1.d. Kesehatan dan Pendidikan		0,30
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya		4,81
1.f. Hotel dan Restoran		2,46
1.g. Lainnya		2,06
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT		6,06
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)		4,55
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)		5,77
4.a. Bangunan		5,89
4.b. Non-Bangunan		5,27
5. Perubahan Inventori		9,09
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)		2,16
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)		15,11
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7)		4,19

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara